

BAB IV

REFLEKSI KRITIS SOEKARNO DALAM TERANG

CENDIKIAWAN MUSLIM INDONESIA

Sekularisme politik yang dipelopori tidak pernah mati. Ia tetap hidup dan berkembang dalam dua level sekaligus; level sosialisasi gagasan dan level implementasi dalam bentuk kebijakan-kebijakan Negara terhadap Islam politik. dimasa setelah kematian Soekarno (1970) gagasan-gagasan sekularisme politik Soekarno tentang pemisahan agama dari Negara dan depolitisasi Islam telah dibelakukan. Runtuhnya rezim Orde Lama Soekarno (1966-1967) tidaklah secara otomatis mengubah kebijakan sekularisasi Soekarno terhadap Islam. Soeharto, penguasa Ode Baru dalam persoalan hubungan agama dengan Negara pada esensinya tetap mengimplementasikan kebijakan sekularisasi politik.

Kebijakan sekularisasi politik Islam orde baru, yang nota bene Islam (Katolik radikal dan kamu Abangan), tetapi juga cendikiawan muslim Indonesia. Diatara pemikir terkemuka Islam sendiri muncul gerakan-gerakan intelektual yang mengkampanyekan gagasan sekuler seperti nampak dalam gagasan kelompok pembaharuan pemikiran Islam yang di pelopori Nurcholis Madjid, Djohan Effendi maupun Abdurrahman Wahid. Gagasan pemisahan Negara dan agama para kelompok pembaharuan ini agak berbeda dengan pemikiran Soekarno, gagasan mereka jauh lebih *sophisficated*, sistematis, terarah dan moderat dan tidak vulgar atau primitive. Gerakan para kelompok pembaharuan ini dimaksudkan untuk merobos kebekuan berfikir umat Islam, menyegarkan paham

keagamaan, atau dalam istilah Cak Nur (Nurcholis Madjid) sebagai kekuatan pendorong psikologis (*Psychological driving force*)

A. Soekarno dalam Terang Cak Nur.

Dalam salah satu tulisannya Soekarno menulis :

“..... bahwa agama itu perlu dimerdekakan dari asuhannya (Negara) supaya menjadi subur..... saya memerdekakan Islam dari ikatan Negara, agar supaya Islam bukan hanya tinggal agama memutar tasbih di dalam masjid sahaja, tetapi menjadilah satu gerakan yang membawa kepada perjuangan.”¹²⁶

“.....maka kemerdekaan agama dari ikatan agama itu berarti juga, kemerdekaan Negara dari ikatan-ikatan agama yang jumud, yakni kemerdekaan Negara dari hokum-hukum tradisi dan paham Islam kolot yang sebenarnya bertentangan dengan jiwanya Islam sejati, tetapi selalu menjadi rintangan nyata bagi gerak-geriknya Negara kemajuan dan kemerdekaan. Islam dipisahkan dari Negara agar supaya Islam dapat menjadi merdeka dan negarapun menjadi nerdeka, agar supaya Islam berjalan sendiri agar supaya Islam dan Negara pun subur pula.”¹²⁷

Pandang Soekarno yang demikian menyiratkan keinginan Soekarno untuk memisahkan secara formal agama dan Negara. Gagasan Soekarno yang masih mentah itu, dalam pemikiran Cak Nur menjadi pemikiran yang sistematis dan tidak sekedar pemikiran yang emosional..

Cak Nur menyatakan dirinya tidak anti Islam sebagai agama, tetapi antipolitisasi Islam. Ia menolak politisasi Islam untuk kepentingan kelompok ideologis-politik yang tergabung dalam partai-partai Islam. Ia dan kelompoknya

¹²⁶ Soekarno, *Di bawah Bendera Revolusi*, (Jakarta: Panitia Di bawah Bendera Revolusi, JilidI: 1964), 404.

¹²⁷ *Ibid*, 405.

mengkampanyekan gerakan anti partai politik Islam sepanjang decade 1970-an. Terkenal dengan semboyannya ketika itu : Islam Yes, Partai Islam No!. dalam perspektif Cak Nur, kekuatan politik Islam tidaklah selalu identik dengan partai-partai Islam apalagi bila lembaga-lembaga politik itu dijangkai korupsi, koncoisme, nepotisme dan konflik sesama elite partai yang tak berkesudahan. Lebih dari itu dan konflik sesama elite yang tak kesudahan. Lebih dari itu Cak Nur, sama dengan Soekarno, menilai konsep Negara Islam tidak ada dalam sejarah Islam, tidak didukung nash-nash Al-Qur'an serta sebuah apologi barat atas dunia Islam selama beradab-adab.¹²⁸

Menurut Cak Nur, apa yang disebut “Negara Islam” sebenarnya tidak dikenal dalam sejarah. Buktinya Nabi Muhammad sendiri baru dimakamkan tiga hari setelah wafat, akibat umat rebut soal suksesi. Karena pola suksesi yang tidak jelas maka yang terjadi adalah ketidakjelasan. Dengan demikian masalah kenegaraan tidak menjadi bagian integral dari Islam. Mengenai munculnya gagasan Negara Islam atau Islam sebagai Negara tegak Cak Nur, tidak lain merupakan bentuk kecenderungan apologetis.¹²⁹ Apologi ini menurut Nurcholish muncul dari dua kecenerungan. Pertama, karena apologi seperti demokrasi, sosialisme, komunisme, dan lain sebagainya. Kedua, karena legalisme yaitu apresiasi serba legalis dan kumpulan hukum. Jadi, konsep Negara Islam dalam pandangan Cak Nur adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara Negara dan agama. Negara merupakan segi kehidupan duniawi yang dimensinya rasional dan kolektif. Sedangkan agama merupakan segi lain yang dimensinya spiritual

¹²⁸ Lihat karya-karya Nurcholish Madjid, termasuk buku yang berisi surat-menyurat Nurcholish Madjid dan Muhammad Roem.

¹²⁹ Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Ke-Indonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1987), 253.

dan pribadi. Karena itu tidak heran manakala ia menolak bila Islam dipandang sebagai ideology,¹³⁰ yang dalam konteks pemikiran Soekarno sebagai gerakan untuk memisahkan agama dari Negara atau memerdekakan Negara dari agama. Deideologisasi yang dianut Soekarno dan Cak nUr ini disebabkan, pandangan langsung sebagai ideology bisa berarti merendahkan agama itu setaraf dengan berbagai ideology yang ada di dunia.

Konsisten dengan pandangan diatas bagi Cak Nur, eksistensi Negara Nasional yang telah dibentuk Soekarno ini tidak menjadi persoalan. Tidak ada, hubungan kontradiktif antara Negara nasional dengan visi keIslaman. Sebab itu sudah menjadi keharusan sejarah. Pada faktanya, kini tidak seluruh dunia Islam. Ia menandakan, nasionalisme memang pernah sampai menjadi semacam saingan agama, karena nasionalisme menjadi pusat pandangan hidup. Menurutnya, nasionalisme sebagai paham hidup yang sentral jelas tidak dapat diterima, tetapi nasionalisme sebagai paham hidup yang sentral jelas tidak dapat diterima, tetapi seorang muslim menjadi nasionalis adalah tidak apa-apa. Yang ditentang Islam bukanlah nasionalisme, tetapi chauvinisme atau fasisme. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa eksistensi Negara nasional adalah abash Nurcholis pada akhirnya menandakan, umat Islam tidak perlu menuntut Negara atau pemerintah ini menjadi Negara atau pemerintah Islam. Baginya yang penting adalah isi atau substansinya, bukan bentuk formalnya.¹³¹ Menurut Soekarno, cita-cita ini dapat diwujudkan dengan kerja keras dari umat Islam dengan merebut kursi-kursi di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk menyuarakan aspirasi rakyat, khususnya

¹³⁰ Nurcholish Madjid, "Cita-cita Politik Kita" dalam Bosco Carvallo dan Dasrizal (Peny), *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Leppenas, 1983), 4.

¹³¹ Nurcholish Madjid, *Khilafah dan Perkembangannya*, dalam *Nuansa*, edisi Desember, 1994.

muslim, tetapi tidak enggan keinginan membentuk pemerintahan atas dasar formalisme agama.¹³²

Soekarno dan Cak Nur sama-sama menghendaki agama sebagai ajaran moralitas atau *religion of morality*, yaitu agama dipandang tidak memiliki doktrin atau ajaran tentang peraturan social, seperti memulai pranata hukum atau doktrin social-politik. pola hubungan yang ideal yang harus dibangun antara Negara dan agama adalah integrative-substantif. Artinya, agama tidak bisa mengintervensi secara formal terhadap Negara, akan tetapi nilai universal Islam dapat diakomodasikan ke dalam pranata hukum suatu Negara.

Untuk mencari jalan keluar konflik hubungan agama dan Negara, Cak Nur memiliki pandangan yang menglaborasi keduanya. Elaborasi yang dimaksud Cak Nur tergambar jelas lewat gagasan integrasi keIslaman dan ke Indonesiaan. Menurutnya, sekalipun nilai-nilai dan ajaran Islam itu bersifat universal, namun pelaksanaan ajaran itu menurut pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan sosio-kultural masyarakat Indonesia secara integral.¹³³

Elaborasi Cak Nur atas integrasi keIslaman dan ke Indonesiaan, semakin konkrit ketika ia menjelaskan hubungan Islam dan ideology Pancasila. Ia berpendapat bahwa kaum muslim Indonesia dapat menerima Pancasila dan UUD 1945 itu dengan pertimbangan yang jelas. Kedudukan dan fungsi Pancasila serta UUD 1945 sebenarnya mirip dengan kedudukan serta fungsi dokumen politik pertama dalam sejarah Islam, yaitu Piagam Madinah. Selanjutnya ia menyatakan sebanding dengan sikap kaum muslim Indonesia dalam menerima Pancasila dan

¹³² Lihat Soekarno, *Di bawah Bendera.....*, 452.

¹³³ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah telaah kritis tentang Masalah Keimanan Kemanusiaan dan Kemerdekaan* (Jakarta: Paramadina, 1992), ixxii-ixxiv.

UUD1945, orang-orang muslim yang dipimpin Rasulullah SAW itu menerima konstitusi Madinah adalah juga atas pertimbangan nilai-nilainya yang dibenarkan oleh Islam dan fungsinya sebagai kesepakatan antar golongan untuk membangun masyarakat politik bersama.¹³⁴

B. Soekarno dalam Terang Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Sebagian Cak Nur dalam merefleksikan pemikiran Soekarno, Gus Dur juga menjelaskannya secara Sophisticated, hal yang sebelumnya tidak bisa dilakukan Soekarno terhadap penyerang pemikirannya. Dalam menjelaskan relasi agama dan Negara, Gus Dur lebih bersikap sebagai seorang teolog . menurutnya, dalam Islam sama sekali tidak memiliki bentuk Negara. Yang penting bagi Islam adalah etik masyarakat, alasanya Islam tidak mengenal konsep pemerintahan yang definitive. Dalam persoalan yang paling pokok yakni suksesi kekuasaan ternyata Islam tidak memiliki bentuk tetap, terkadang kalau Islam mempunyai konsep yang baku pastilah tidak akan terjadi bentuk yang sedemikian beragam.¹³⁵

Lebih lanjut Gus Dur mengembangkan pemikirannya, tentang bangsa. Pemikirannya ini dapat menjelaskan tentang konsep Nasionalisme-Islam versi Soekarno, yang tidak mampu ia terangkum secara sistematis sehingga pada masanya pandangannya ini menuai kontroversi. Menurut GusDur, Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan adanya bangsa. Jadi tidak perlu muncul kesulitan dalam mencari kaitan antara Islam dan wawasan kebangsaan. Tetapi ia mengakui, pengertian bangsa dalam rumusan Al-Qur'an hanya terbatas pada pengertian

¹³⁴ Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik.....*, 11.

¹³⁵ Abdurrahman Wahid, *Merumuskan Hubungan Ideologi Nasional dan Agama” dalam AULA*, Edisi Mei 1985.

bangsa sebagai etnis yang mendiami teritorial secara bersama. Sementara dimensi kebangsaan dimasa modern pengertiannya sudah lain, yaitu satuan politis konsep nation state (Negara bangsa). Singkatnya, Islam dan wawasan kebangsaan dapat ditemukan secara proporsional meskipun ada beberapa kesukaran. Kesulitan terbesar dalam mencari kaitan antara Islam yang seolah-olah supranasional. Sebagaimana suatu agama, Islam menjangkau kemanusiaan secara menyeluruh dengan tidak memperdulikan nilai-nilai Islam kedalam konstruk ideologis yang bersifat nasional. Salah satu cara untuk meneropong kaitan antara wawasan kebangsaan dari sebuah masyarakat bangsa ialah dengan mengembalikan sudut pandang fungsional antara keduanya. Dalam hal ini Islam haruslah ditilik dari fungsinya sebagai pandangan hidup yang mementingkan kesejahteraan warga masyarakat, apapun bentuk masyarakat yang digunakan.¹³⁶

Dengan demikian dapat digaris bawahi, misi Islam tidaklah bertentangan dengan paham kebangsaan. Sebuah argumentasi yang tidak dapat dijelaskan Soekarno dalam tulisannya. Cak Nur, Gus Dur dan Soekarno yakni keduanya paralel, artinya dalam memperjuangkan misi Islam tidak dapat lepas dari kepentingan dan kondisi regional bangsa. Justru dalam dimensi kebangsaan itu ajaran Islam menjadi mungkin dimanifestasikan secara kongkrit. Tugas Islam yang utama adalah mengembangkan etika social yang memungkinkan tercapainya kesejahteraan kehidupan umat manusia, baik melalui bentuk masyarakat yang bernama Negara nasional maupun lainnya.

¹³⁶ Abdurrahman Wahid, "Pribumisasi Islam", dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im (ed), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, (Jakarta: P3EM, 1989), 10-11.

Gus Dur menyatakan bahwa berdirinya Negara Islam lebih disebabkan oleh adanya kesadaran berbangsa, bukan hanya sekadar karena factor ideology Islam. Menurutnya, ini merupakan kenyataan yang harus diterima secara obyektif sebab ia rasakan adanya gejala, kenyataan obyektif demikian belum tuntas dipahami oleh sebagian aktivis pergerakan Islam di Indonesia. Sekarang maupun para zaman Soekarno. Ia berpendapat, ajaran Islam sebagai komponen yang membentuk dan mengisi kehidupan warga Negara Indonesia, seharusnya diperankan sebagai factor komplementer bagi komponen-komponen lain. Dengan begitu, ia tidak akan berfungsi sebagai factor tandingan yang dapat mengundang disintegrasi dalam kehidupan berbangsa secara keseluruhan.¹³⁷

Selanjutnya Abdurrahman Wahid menunjukkan kelemahan sebagian aktivitas pergerakan Islam yang berpegang pada pola idealistic yang menganggap Islam sebagai alternative terhadap paham-paham kenegaraan lain. Agenda kelompok ini adalah bagaimana menjadikan Islam sebagai pemberi warna tunggal bagi kehidupan masyarakat. Sementara menurut tinjauan empiris Abdurrahman Wahid, kekuatan ideologis Islam itu cukup besar, seperti terbukti dari peran dan kehadiran para pemimpin Islam dalam upaya persiapan kemerdekaan Indonesia dan kemudian mempertahankan kemerdekaan. Besarnya kekuatan ideologis Islam itu ternyata hanya terbatas pada level atas saja, sedangkan dukungan dari bawah tidak cukup kuat. Jika dukungan itu cukup besar tentunya masyarakat Islam tidak akan begitu saja menerima bentuk kompromistik yang dicapai para pemimpin nasional waktu itu. Yang terjadi justru sebaliknya, semakin mantapnya

¹³⁷ *Ibid.*..., 3-4.

Republik Indonesia sebagai Negara yang pada hakikatnya hanya bersedikan kebangsaan belaka.¹³⁸

Sebagaimana Cak Nur, Gus Dur juga memandang bahwa Islam tidak mengenal doktrin tentang Negara an sich. Doktrin Islam tentang Negara adalah doktrin tentang keadilan dan kemakmuran. Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat doktri tentang keadilan dan kemakmuran. Yakni doktrin itu berasal dari pemimpin Islam yang ikut menyusun mengaddimah kostitusi Negara kita. Selama pemerintah bisa mencapi dan mewujudkan keadilan dan kemakmuran hal itu sudah merupakan kemauan Islam. Tidak diperlukan lagi doktrin Islam tentang negar harus berbentuk formalisasi Negara Islam. Islam tidak punya wujud doktrin yang pasti tentang bagaimana melaksanakan hal-hal kenegaraan. Karena itu, banyak pemimpin kita masa lalu sulit merumuskan apa dan bagaimana Negara Indonesia yang sesuai dengan paham Islam. Karena mereka tidak mampu mengajukan tawaran maka, menurut Gus Dur, akhirnya mereka harus merespon tawaran Bung Karno yang mengangkut Pancasila.¹³⁹

Lebih tegas Gus Dur menyatakan bahwa tidak usah mencari-cari alasan (dalil) mengabsahkan format Negara, agama, karena memang tidak ada yang ideal. Islam tidak menyebutkan soal Negara ideal, dan juga tidak mengharuskan. Allah meridhoi islam sebagai agama bukan sebagai system pemerintahan. Islambisa menjadi besar kalau ia tidak menampilkan wajah politik melainkan

¹³⁸ *Ibid.*..., 3-4.

¹³⁹ Ahmad Amir Aziz, *Neo Modernisme Islam di Indonesia, gagasan sentral Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 103.

mengutamakan wajah moralnya. Atau dengan kata lain Islam mengutamakan politik sebagai institusi.¹⁴⁰

C. Soekarno dalam Tenang Djohan Efendy

Djohan Efendy adalah intelektual muslim yang paling mendukung Pancasila sebagai dasar Negara, dengan alasan pancasila merupakan pilihan tepat untuk iklim Indonesia. Da

Lam mencari ideology Negara, bangsa Indonesia dapat berjalan dalam dua arah, Negara agama atau sepenuhnya sekuler. Menghayati hal ini cukup dimengerti bahwa Djohan memakai bahasa yang keras demi memuji kecerdikan doktrin Pancasila :

Adlah suatau keputusan dan tindakan sangat histories dan jenial dari para pendahulu dan pendekar pergerakan kemerdekaan bangsa kita bahwa mereka telah berhasil bersepakat menetapkan Pancasila sebagai “Falsafah kenegaraan” dan “Ideologi Kebangsaan” yang mendasari kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan bangsa kita. Keputusan dan tindakan yang sangat arif dan mengandung wawasan yang jauh ke depan itu telah melepaskan bangsa kita walaupun tidak sepenuhnya dari permasalahan ideologis tentang hubungan agama dan Negara. Sebab seakan-akan tidak ada kemungkinan lain bagi suatu bangsa yang ingin mewujudkan hidup kenegaraannya kecuali mengambil salah satu dari dua pilihan, menjadi Negara agama atau menjadi Negara sekuler. Kalau menjadi Negara agama maka pemerintah harus didasarkan pada suatu agama, setidak-tidaknya menjadikan sesuatu agama sebagai agama

¹⁴⁰ *Ibid.*..., 104.

resmi atau agama Negara, dan sebaliknya kalau menjadi Negara sekuler maka pemerintahan harus sama sekali berlepas tangan dan tidak mau mengurus hajat keberagaman warga Negara. Akan tetapi dengan keputusan dan tindakan para pendahulu kita itu, bangsa kita telah menentukan pilihan lain. Indonesia bukanlah Negara agama dan bukan pula Negara sekuler. Indonesia adalah Negara Pancasila yang disamping menghormati asas “keemrdekaan beragama” juga berusaha melayani hajat dan kepentingan keagamaan segenap warga Negara”¹⁴¹

Secara jelas salah satu nilai-nilai kebaikan Pancasila menurut Djohan, bahwa Pancasila mampu melakukan pemilihan perangkat perang agama dan Negara meskipun pemilihan-pemilihan tersebut menurut Djohan kurang memuaskan. Kebaikan ini dapat digambarkan sebagai hal yang preventif, menawarkan jalan keluar dan mencegah untuk melilih antara dua hal yang buruk. Namun Djohan juga melihat Pancasila sebagai mampu memberi sesuatu yang positif dalam cara memberikan struktur jati diri Indonesia yang non sektorian, dimana hal ini memberi gambaran terbaik dari variasi tradisi-tradisi yang ada di Indonesia.¹⁴²

Lebih spesifik, penciptaan Negara teistik. Sekuler melalui doktrin Pancasila memberi peran memandu yang bermanfaat terhadap Negara dalam persoalan-persoalan agama, dalam arti bahwa Negara di khawatirkan memperoleh kesulitan dalam membenaran atau perwujudan jika ideologinya sepenuhnya secular. Secara khusus, pancasila menawarkan kerangka konseptual guna

¹⁴¹ Kutipan Artikel Djohan Effendi yang dikutip Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Ankara, 1999), 245.

¹⁴² *Ibid.*..., 246.

mengarahkan sikap serta perilaku masyarakat yang majemuk dalam agama. Katakanlah bahwa Pancasila adalah sebuah cara memformalkan kebutuhan terhadap keinginan baik diantara seluruh agama dan masyarakat.

Sebagaimana dikutip Greg Barton, alasan Djohan yang terakhir dalam mendukung Pancasila karena :

Dalam usaha membangun kehidupan agama dalam kerangka masyarakat Pancasila maka kaum muslimin mestilah mampu melepaskan diri dari pemikiran yang memisahkan antara “umat” dengan kepentingan “bangsa”, antara kepentingan “pemerintah” dengan kepentingan “masyarakat”

Usaha kaum muslimin Indonesia dalam membangun kehidupan agama harus juga mencakup usaha memasyarakatkan Pancasila dalam kehidupan Negara dan bangsa.¹⁴³

Menyarikan ini semua dapat dikatakan, menurut Greg Barton, bahwa dukungan Djohan Effendi terhadap Pancasila lebih merupakan komitmennya terhadap pluralisme, sebab dalam situasi terbaiknya Pancasila memberi jaminan, sebagaimana setiap ideology Negara dapat menjamin apasaja; sebuah komitmen sosial terhadap pluralisme.¹⁴⁴ Dengan kondisi bangsa Indonesia, dan mengakui kebrilian Soekarno dengan menawarkan konsep Pancasila sebagai jalan tengah yang jika boleh dikatakan pemikiran mereka bisa menjelaskan pemikiran-pemikiran Soekarno yang masih remang-remang.

Cak Nur, Gus Dur dan Djohan oleh sebagian kalangan digolongkan ke dalam pemikiran neo modernisme, dimana mereka mengkomodasikan

¹⁴³ *Ibid.*..., 247.

¹⁴⁴ *Ibid.*..., 248.

pemikiran-pemikiran modern dari barat kemudian di elaborasi ke dalam pemikiran Islam dari ketiga pemikiran mereka, jelas bahwa pemikiran Soekarno pada masanya. Sebenarnya telah meloncat jauh, dan seiring perjalanan zaman ia mendapat jawabannya sendiri.